

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Realisasi Pendapatan DKI Lampau Target

Pencapaian didukung kondisi makro ekonomi yang membaik serta meningkatnya pertumbuhan dan inflasi yang terjaga.

JAKARTA - Realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta tahun lalu sedikit melampaui target. Hingga 31 Desember mencapai 71 triliun atau setara 100,53 persen dari target 70,6 triliun. "Capaian ini meningkat 3,7 triliun dibanding pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 67,3 triliun," ujar Penjabat Gubernur Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (9/1).

Berdasarkan persentase terhadap anggaran, kata Heru, terdapat kenaikan sebesar 14,03 persen dibanding tahun 2022 yang terealisasi sebesar 86,5 persen. Menurutnya, berbagai insentif kebijakan fiskal yang diimplementasikan da-

lam kebijakan pajak daerah, seperti pemberian kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi pendorong tercapainya target.

Heru menyebutkan, realisasi pendapatan daerah yang melebihi dari target tersebut didukung kondisi makro ekonomi yang membaik serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga. Maka, di tengah kondisi ekonomi global dan domestik serta adanya pandemi Covid-19 hingga fenomena El-Nino, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemprov DKI Jakarta mampu tumbuh optimal.

Realisasi pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 49,1 triliun atau mencapai 101,46 persen dari target sebesar 48,4 triliun. PAD ini terdiri dari pos pajak daerah yang terealisasi sebesar 43,5 triliun (101,2 persen).

Kemudian, pos hasil penge-

lolaan kekayaan daerah terealisasi sebesar 545,8 (100 persen). Selanjutnya pos lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 4,6 triliun (104,47 persen). Lalu, retribusi daerah yang terealisasi sebesar 454 miliar.

Kemudian, pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar 20,2 triliun (99,68 persen). Sedangkan yang berasal dari lain-ain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 1,7 triliun.

Untuk realisasi belanja daerah tahun lalu mencapai 92,54 persen atau 66,7 triliun dari anggaran 72,1 triliun. Capaian ini berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 8,27 persen dibandingkan tahun 2022.

"Pada tahun 2022 terealisasi sebesar 84,27 persen atau mencapai 64,8 triliun," kata Heru dikutip *Antara*. Realisasi belanja daerah ini terdiri dari pos realisasi belanja operasi 57,5 triliun (95,31 persen). Ini berasal dari belanja: pegawai, barang-jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja Daerah

Sementara itu, dalam realisasi belanja daerah yang berasal dari pos belanja modal sebesar 8,8 triliun (81,62 persen). Ini terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan, dan mesin. Selain itu, belanja: modal gedung-bangunan, modal jalan, jaringan-irigasi, modal aset tetap lainnya hingga belanja bantuan keuangan terealisasi sebesar 356,4 miliar (100 persen).

Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah hingga 31 Desember mencapai 8,8 triliun (99,96 persen). Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mencapai 6,6 triliun. Ini setara dengan 89,16 persen dari anggaran sebesar 7,4 triliun.

Capaian tersebut meningkat sebesar 2,1 triliun dibanding pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 yang mencapai 4,5 triliun. Berdasarkan persentase terhadap anggaran, terdapat kenaikan sebesar 11,64 persen dari tahun 2022 yang terealisasi 77,52 persen.

Adapun pos pengeluaran

pembiayaan daerah terdiri dari pos Penyertaan Modal Daerah (PMD) 88,45 persen dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo terealisasi 100 persen. Dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun lalu mencapai 6,6 triliun.

Dibanding Silpa Tahun 2022 sebesar 8,6 triliun, maka terdapat peningkatan optimalisasi pengeluaran APBD dengan adanya penurunan Silpa sebesar 2 triliun dari Silpa tahun 2022. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengelola APBD sesuai dengan aturan pemerintah yang bagus (good governance), akuntabel, dan transparan. Tentu itu semua juga disertai kehati-hatian dan berkualitas.

Heru berharap APBD Jakarta mampu menjadi instrumen andal yang mendukung dunia usaha, melindungi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. "Tentu akhirnya mampu mewujudkan Jakarta Kota Global," tandasnya. ■ **wid/G-1**